



BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 16 B TAHUN 2011

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2011 – 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul adalah dengan ditetapkannya indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri yang ada di bawahnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2011 - 2015

#### B A B I K E T E N T U A N U M U M P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah.

5. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
6. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bantul.
8. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### Pasal 3

Indikator kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Indikator kinerja Utama Pemerintah Daerah digunakan oleh organisasi perangkat daerah untuk :

- a. menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
- b. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- d. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disusun setiap tahun.

## BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 5

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bantul.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 25 Februari 2011

**BUPATI BANTUL,**  
ttd

**SRI SURYA WIDATI**

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor        16 B Tahun 2011  
Tanggal      25 Februari 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,**  
ttd

**RIYANTONO**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

Ttd

**ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum**

**Penata Tingkat I (III/d)**

**NIP.196402191986031023**



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR : 16 B TAHUN 2011

TANGGAL : 25 Februari 2011

1. Nama Unit Organisasi : **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL.**  
 2. Tugas dan Fungsi : Penyelenggaraan Pemerintahan , Pembangunan dan Kemasyarakatan untuk mewujudkan Masyarakat Kabupaten Bantul yang Projo Taman Sari , Sejahtera , Demokratis dan Agamis

**Indikator Kinerja Utama**

NO	URAIAN	RUMUS	ALASAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur Pemerintah Daerah dan Desa serta lembaga Pemerintah.</b>				
1	Tingkat pendidikan aparat D3, D4, S1, S2, S3	$\frac{\text{Jumlah Pegawai yang berpendidikan( D3, D4, S1, S2, S3)}}{\text{Jumlah seluruh pegawai}} \times 100\%$	Mengukur kinerja pegawai sesuai dengan tingkat pendidikan.	BKD
2	Jumlah SKPD yang telah di ketahui Beban Kerja dan Formasi Jabatan.	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang telah diketahui beban kerja dan formasi jabatannya}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \times 100\%$	Mengukur penataan dibidang Formasi jabatan dan aparatur	Bagian Organisasi
3	Peningkatan disiplin kerja aparatur pemerintahan Desa.	$\frac{\text{Jumlah aparat desa yang melanggar}}{\text{Jumlah aparat desa}} \times 100\%$	Mengukur tingkat kepatuhan aparatur Pemerintahan Desa dalam menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.	Inspektorat
4	Peningkatan disiplin kerja PNS	$\frac{\text{Jumlah aparat PNS yang melanggar}}{\text{Jumlah seluruh PNS}} \times 100\%$	Mengukur tingkat kepatuhan PNS dalam menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.	Inspektorat

5	Pelaksanaan tatalaksana perangkat daerah	$\frac{\text{Jumlah kegiatan dilingkup tata laksana yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah keseluruhan kegiatan di lingkup tata laksana perangkat daerah}} \times 100\%$	Mengukur pelaksanaan ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bantul sesuai dengan peraturannya yang berlaku.	Bagian Organisasi
6	Penanganan pelanggaran disiplin kepegawaian.	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran yang ditangani}}{\text{Jumlah pelanggaran}} \times 100\%$	Mengukur efektifitas kebijakan dalam peningkatan disiplin PNS	BKD
7	Peningkatan kapasitas kelembagaan	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang ditetapkan sesuai peraturan pemerintah Pusat}}{\text{Jumlah yang dibentuk oleh Kabupaten Bantul}} \times 100\%$	Mengukur jumlah SKPD yang telah diatur struktural kelembagaan dan tugas pokok fungsinya.	Bagian Organisasi
8	Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	$\frac{\text{Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana}}{\text{Jumlah keseluruhan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan}} \times 100\%$	Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan
9	Meningkatnya tertib administrasi kecamatan.	$\frac{\text{Jumlah kecamatan yang tertib administrasinya}}{\text{Jumlah keseluruhan kecamatan}} \times 100\%$	Mengukur tingkat ketertiban administrasi kecamatan	Bagian Tata Pemerintahan
10	Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pelatihan manajemen pemerintahan desa	$\frac{\text{Jumlah aparat Pemerintah Desa yang dilatih}}{\text{Jumlah keseluruhan aparat Pemerintah Desa}} \times 100\%$	Peningkatan kemampuan sumber daya manusia aparat pemerintah Desa	Bagian Pemerinthan desa
11	Frekuensi pelayanan penerimaan kunjungan kerja Presiden. Wakil Presiden, Menteri Negara, DPR-RI, DPRD, Departemen, lembaga Pemerintah Non Depertemen dan lembaga lainnya	$\frac{\text{Jumlah penerimaan Kunjungan tamu}}{\text{Rencana penerimaan kunjungan tamu}} \times 100\%$	Mengukur tingkat kunjungan tamu ke Pemerintah Kabupaten Bantul	Bagian Protokol

<b>Sasaran 2 : Meningkatnya Transparansi, Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi</b>				
1	Turunnya indikasi penyimpangan anggaran	$\frac{\text{Jumlah inkasi penyimpangan tahun } n - (\text{tahun } n-1)}{\text{Jumlah indikasi penyimpangan tahun } n-1} \times 100\%$	Mengukur tingkat indikasi penyimpangan anggaran	Inspektorat
2	Penerapan system pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada SKPD jumlah SKPD yang menerapkan	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \times 100\%$	Mengukur penerapan SPIP di SKPD	Inspektorat
3	Temuan Pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	$\frac{\text{Jumlah temuan pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah seluruh temuan}} \times 100\%$	Hasil-hasil pemeriksaan oleh aparat pemeriksa eksternal harus ditindak lanjuti secara tepat.	Inspektorat
4	Temuan pemeriksaan internal yg selesai di tindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah temuan pemeriksaan internal yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah seluruh temuan}} \times 100\%$	Hasil-hasil pemeriksaan oleh aparat pemeriksa internal harus ditindak lanjuti secara tepat.	Inspektorat
5	SKPD yang telah melaksanakan tata kearsipan	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang telah melaksanakan tata kearsipan}}{\text{Jumlah seluruh temuan}} \times 100\%$	Mengukur kemampuan dalam tata kearsipan	Kantor Arsip
6	Jumlah ketersediaan petugas arsip pada SKPD	$\frac{\text{Jumlah petugas arsiparis}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$	Mengukur kemampuan SKPD dalam mengelola arsip	Kantor Arsip
7	Siaran taman gabusan di TVRI jogja	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan siaran taman gabusan di TVRI jogja}}{\text{Rencana pelaksanaan siaran taman gabusan di TVRI jogja}} \times 100\%$	Menyebarkan Informasi pemerintahan, pembangunan dan kebijakan Pemda.	Bagian Humas
8	Dialog interaktif di radio, baik pemerintah maupun swasta.	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan dialog di radio, baik pemerintah maupun swasta}}{\text{Rencana pelaksanaan dialog di radio, baik pemerintah maupun swasta}} \times 100\%$	Menyebarkan Informasi pemerintahan, pembangunan dan kebijakan Pemda.	Bagian Humas

9	Frekuensi pelaksanaan Publik Hearing baik di Kecamatan, Desa maupun Dusun	$\frac{\text{Pelaksanaan Publik Hearing}}{\text{Rencana Pelaksanaan Publik Hearing}} \times 100\%$	Dengan terlaksananya Public Hearing akan semakin banyak masukan permasalahan yang ada di masyarakat dan penanganannya/solusinya akan lebih efektif dan bermakna.	Setwan
10	Jumlah penyelenggaraan Bantul Expo	$\frac{\text{Jumlah penyelenggaraan Bantul Expo}}{\text{Rencana penyelenggaraan Bantul Expo}} \times 100\%$	Menyediakan ajang promosi sekaligus pemasaran potensi Daerah serta menyajikan hasil kegiatan pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	Bagian Humas
11	Kesesuaian program kerja SKPD dengan RPJMD	$\frac{\text{Program kerja SKPD yang sesuai RPJMD}}{\text{Program kerja RPJMD}} \times 100\%$	Mengukur kesesuaian program kerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD	Bappeda
<b>Sasaran 3 : Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.</b>				
1	Prosentase kenaikan pajak dan retribusi daerah.	$\frac{\text{Pendapatan pajak dan retribusi daerah tahun ini} - \text{tahun lalu}}{\text{Pendapatan pajak dan retribusi daerah tahun lalu}} \times 100\%$	Mengukur intensifikasi dan ectensifikasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah	DPKAD
2	Rasio PAD terhadap penerimaan APBD	$\frac{\text{PAD}}{\text{PD}} \times 100\%$	Mengukur intensitas, efektifitas dan transparansi, pemungutan sumber –sumber Pendapatan Asli Daerah.	DPKAD
3	Rasio PAD terhadap pengeluaran APBD	$\frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Total penerimaan APBD}} \times 100\%$	Mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Desentralisasi dengan melihat tingkat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah.	DPKAD

4	Jumlah peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah	Jumlah peraturan bupati yang diterbitkan dalam rangka pengeluaran keuangan dan aset daerah pada tahun t.	Mengukur kinerja organisasi dalam pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah	DPKAD
5	Jumlah Perda tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun.	Jumlah Perda APBD yang ditetapkan pada tahun t	Mengukur ketepatan waktu dalam penetapan APBD	DPKAD
6	Jumlah Perbub tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun	Jumlah Perbub APBD yang ditetapkan dalam tahun t	Mengukur ketepatan waktu dalam penetapan APBD	DPKAD
7	Rasio pertumbuhan belanja modal	$\frac{\text{Belanja modal th t} - \text{Belanja modal th (t-1)}}{\text{Belanja modal th (t-1)}} \times 100\%$	Mengetahui jumlah belanja modal yang diadakan oleh pemerintah Kab. Bantul.	DPKAD
<b>Sasaran 4 : Meningkatkan Kualitas pelayanan publik.</b>				
1	Terwujudnya tertib administrasi ke tatauusahaan, persuratan dan kearsipan	$\frac{\text{Prosentase ketertiban administrasi ketatauusahaan dan kearsipan}}{\text{Rencana prosentase ketertiban administrasi ketatauusahaan dan kearsipan}} \times 100\%$	Mengukur tingkat ketertiban administrasi ketatauusahaan dan kearsipan di bagian umum.	Bagian Umum
2	Penyusun indeks kepuasan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah unit 14 unsur IKM dari seluruh UPP} \times 0,017 \times 25}{\text{Jumlah seluruh unit pelayanan}}$ (nilai merupakan interval 1 -4)	Mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Publik (UPP)	Bagian Organisasi
3	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penanganan pengaduan masyarakat.	$\frac{\text{Jumlah UPP yang sudah dilakukan penyusunan IPM (indek Pengaduan Masyarakat)}}{\text{Jumlah keseluruhan UPP (Unit Pelayanan Publik)}} \times 100\%$	Mengukur kemampuan UPP (unit Pelayanan Publik) dalam menangani pengaduan masyarakat.	Bagian Organisasi
4	SKPD yang menerapkan SPM	$\frac{\text{SKPD pengampu SPM yang telah menerapkan SPM}}{\text{SKPD mengampu SPM}} \times 100\%$	Mengukur penerapan SPM oleh SKPD pengampu SPM	Bagian Organisasi

5	Cakupan penerbitan KTP ber NIK	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP > 17 tahun dan atau pernah/sudah menikah}} \times 100\%$	Mengukur jumlah kepemilikan KTP bagi penduduk kabupaten Bantul dalam rangka Tertib Adminduk	Dispendukcapil
6	Cakupan penerbitan akta kelahiran anak usia 0 – 1 tahun	$\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 0-1 tahun yang memiliki akte kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk usia 0-1 tahun}} \times 100\%$	Mengukur jumlah kepemilikan akte kelahiran bagi anak usia 0-1 tahun dalam rangka tertib adminduk.	Dispendukcapil
<b>Sasaran 5 : Penyingkatan waktu penyelesaian ijin</b>				
1	Penyelesaian ijin rata-rata pertahun.	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian perijinan}}{\text{Jumlah pengajuan perijinan}} \times 100\%$	Percepatan pelayanan perijinan menggambarkan kualitas pelayanan publik yang baik.	Dinas Perijinan
<b>Sasaran 6 : Penyingkatan waktu penyelesaian Pengaduan</b>				
1	Penyelesaian pengaduan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang tertangani}}{\text{Jumlah pengaduan}} \times 100\%$	Percepatan pelayanan/penyelesaian pengaduan menggambarkan kualitas pelayanan publik yang baik.	Dinas Perijinan
<b>Sasaran 7 : Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat (IKM)</b>				
1	Keberhasilan pelayanan	$\frac{\text{Realisasi nilai keberhasilan pelayanan}}{\text{Target nilai keberhasilan pelayanan}} \times 100\%$	Semakin tinggi nilai IKM pelayanan terhadap publik semakin baik.	Dinas Perijinan
<b>Sasaran 8 : Terciptanya kepastian hukum dan ketertiban masyarakat.</b>				
1	Jumlah Produk Hukum daerah yang telah disusun berupa Raperda menjadi Perda	$\frac{\text{Realisasi Jumlah Perda}}{\text{Jumlah Raperda yang di ajukan.}} \times 100\%$	Tercapainya Produk Hukum kepada masyarakat.	Bagian Hukum

2	Menurunnya penyakit masyarakat	$\frac{\text{Jumlah kasus pekat tahun ini} - \text{tahun lalu}}{\text{Jumlah kasus pekat tahun lalu}} \times 100\%$	Semakin kecil penyakit masyarakat semakin, maka tantib semakin kondusif.	Satpol PP
3	Menurunnya pelanggaran Perda	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran Perda tahun ini} - \text{tahun lalu}}{\text{Jumlah pelanggaran Perda Tahun lalu}} \times 100\%$	Untuk mengetahui ketaatan masyarakat terhadap Perda/Perbub yang berlaku.	Satpol PP
4	Capaian penyelesaian Hukum	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan}} \times 100\%$	Untuk mengetahui ketaatan masyarakat terhadap Perda/Perbub yang berlaku di Kabupaten Bantul.	Bagian Hukum
<b>Sasaran 9 : Meningkatnya pemahaman Prinsip-prinsip dasar Hukum dan HAM</b>				
1	Peningkatan Partisipasi Pemilu Legislatif	$\frac{\text{Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif}}{\text{Jumlah masyarakat yang mempunyai hak pilih}} \times 100\%$	Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif	Kesbangpolinmas
2	Peningkatan Partisipasi Pemilu Presiden	$\frac{\text{Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada pemilu presiden}}{\text{Jumlah masyarakat yang punya hak pilih}} \times 100\%$	Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu presiden	Kesbangpolinmas
3	Peningkatan kedisiplinan pelajar sekolah	$\frac{\text{Jumlah kegiatan penertiban pelajar yang tidak disiplin}}{\text{Jumlah target kegiatan penertiban pelajar tidak disiplin}} \times 100\%$	Masih sering ditemui pelajar yang membolos (tidak disiplin) dalam mengikuti pelajaran sekolah	Kesbangpolinmas
4	Pemantauan situasi dan kondisi Ekpoleksosbudhankam	$\frac{\text{Jumlah kegiatan forum kewaspadaan dini (FKDM)}}{\text{Jumlah target kegiatan FKDM}}$	Potensi kerawanan perlu diantisipasi sejak dini.	Kesbangpolinmas
5	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PTUN	$\frac{\text{Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PTUN}}{\text{Target peserta yang mengikuti sosialisasi PTUN}} \times 100\%$	Tercapainya kinerja organisasi dalam melaksanakan PTUN	Bagian Hukum

6	Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan sosialisasi ranham	$\frac{\text{Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan sosialisasi ranham}}{\text{Target peserta yang mengikuti pelaksanaan sosialisasi ranham}} \times 100\%$	Tercapainya kinerja organisasi dalam melaksanakan sosialisasi ranham	Bagian Hukum
<b>Sasaran 10 : Tersedianya sarana berupa tanah untuk pembangunan fasilitas kepentingan umum</b>				
1	Luas tanah yang dibebaskan	$\frac{\text{Jumlah tanah yang akan dibebaskan}}{\text{Jumlah seluruh tanah yang akan dibebaskan}} \times 100\%$	Mengukur kemampuan pemda untuk menyediakan sarana kepentingan umum	Bagian Tata Pemerintahan
<b>Sasaran 11 : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan</b>				
1	Cakupan desa/kelurahan universal child immunization. (UCI)	$\frac{\text{Jumlah desa / kelurahan UCI}}{\text{Seluruh desa / kelurahan}} \times 100\%$	Mengukur kemampuan manajemen Dalam memberikan imunisasi kepada seluruh bayi yang ada sehingga semua bayi mendapatkan Imunisasi lengkap.	Dinas Kesehatan
2	Cakupan balita Gizi buruk yang mendapat perawatan.	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.}}{\text{Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$	Mengukur kemampuan manajemen Program Gizi dalam menangani balita gizi buruk, sehingga bayi dengan gizi buruk dapat ditangani secara cepat.	Dinas Kesehatan
3	Penderita DBD yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah dalam waktu satu tahun}}{\text{Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$	Untuk mengukur Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/ dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	Dinas Kesehatan

4	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	$\frac{\text{Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 1}}{\text{Jumlah seluruh masyarakat miskin di kabupaten}} \times 100\%$	Mengukur kunjungan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata pertama.	Dinas Kesehatan
5	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyidikan Epidemiologi < 24 jam.	$\frac{\text{Jumlah KLB didesa/ kelurahan yang diaatanagni < 24 Jam}}{\text{Jumlah KLB didesa/ kelurahan yang terjadi pada periode yang sama}} \times 100\%$	Mengukur manajemen penanganan KLB pada Desa yang mengalami KLB sehingga harus dilakukan penyelidikan Epidemiologi.	Dinas Kesehatan
6	Bed Occupation Rate (BOR)	$\frac{\text{Jumlah hari perawatan rumah sakit}}{\text{Jumlah TT x Jumlah hari dalam satuan waktu}} \times 100\%$	Untuk mengetahui tinggi rendahnya Pemanfaatan tempat tidur	RSUD
7	Length Of Stay(LOS)	$\frac{\text{Jumlah hari perawatan pasien keluar}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}}$	Mengukur tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur	RSUD
8	Bed Turn Over(BTO)	$\frac{\text{Jumlah pasien keluar (hidup+mati)}}{\text{Jumlah Tempat Tidur}}$	Mengukur tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur	RSUD
9	Turn Over Internal	$\frac{(\text{jumlah tempat tidur x hari}) - \text{hari perawatan rumah sakit}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}}$	Mengambarkan tingkat efiesi tempat tidur	RSUD
<b>Sasaran 12 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</b>				
1	Angka Kematian Bayi (AKB)	$\frac{\text{Jumlah kematian bayi sejak lahir hingga usia 1 tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama}} \times 1000 \text{ penduduk}$ oleh karena proses persalinan atau penyakit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih tingginya AKB di Kab. Bantul</li> <li>Sebagai gambaran kualitas pelayanan material perinatal di institusi pelayanan kes</li> </ul>	Dinas Kesehatan.

2	Angka Kematian Ibu (AKI)	Jumlah kematian ibu dalam masa kehamilan atau dalam waktu 42 hari <u>setelah berakhirnya kehamilan dalam kurun waktu 1 tahun</u> x 100.000 KH Jumlah kelahiran hidup di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih tinginya AKI di Kab. Bantul</li> <li>Sebagai gambaran kualitas pelayanan material perinatal di istitusi pelayanan kesehatan.</li> </ul>	Dinas Kesehatan.
3	Gizi buruk	<u>Jumlah penderita gizi buruk yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu</u> x 100% Jumlah balita di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu	Penderita Balita Gizi buruk berdampak pada penurunan kualitas SDM dimasa mendatang.	Dinas Kesehatan
4	Total KEP Balita	<u>Jumlah penderita KEP yang ditemukan di satu wilayah tertentu</u> x 100% Jumlah balita di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Penderita gizi buruk berdampak pada penurunan kualitas SDM di masyarakat mendatang.	Dinas Kesehatan
5	Angka kesakitan DBD	Jumlah kasus DBD yang ditemukan di satu <u>wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu</u> x 1.000 Penduduk Jumlah penduduk di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	<ul style="list-style-type: none"> <li>DBD masih merupakan penyakit endemic di Kab. Bantul</li> <li>Untuk menilai efektifitas program pemberantasan DBD</li> </ul>	Dinas Kesehatan
6	Penemuan Kasus TB	Jumlah pasien baru TB BTA positif yang ditemukan <u>dan diobati dalam satu wilayah selama satu tahun</u> x 100% Jumlah perkiraan pasien baru TB BTA positif dalam satu wilayah selama satu tahun	Mengukur penemuan TB BTA positif, dan semua penderita TB dapat diobati dengan cepat . angka kesembuhan TB meningkat.	Dinas Kesehatan
7	Penyembuhan Kasus TBC	<u>Jumlah Pasien TB BTA positif yang sembuh dalam satu wilayah selama satu tahun</u> x 100% Jumlah Pasien TB BTA yang diobati dalam satu wilayah dalam waktu satu tahun	Mengukur efektifitas pengobatan pasien TB baru.	Dinas Kesehatan
<b>Sasaran 13 : Meningkatnya desa siaga kategori baik (Purnama dan mandiri)</b>				
1	Cakupan desa siaga aktif	<u>Jumlah Desa Siaga Aktif</u> x 100% Jumlah Desa Siaga dibentuk	Untuk menghitung jumlah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan fungsi	Dinas Kesehatan

			sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawat darurat, surveillance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	
2	Desa Siaga kategori baik (purnama dan mandiri)	$\frac{\text{Jumlah desa Siaga Purnama dan Mandiri disuatu wilayah dalam kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh desa siaga diwilayah tertentu disuatu wilayah dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk menilai cakupan desa yang mempunyai kesiapsiagaan menghadapi masalah kesehatan.</li> <li>• Untuk mengukur cakupan Strata UKBM yang mempunyai kemandirian dalam upaya surveilans berbasis masyarakat pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, Gizi, lingkungan dan perilaku, penanggulangan bencana dan kegawat darurat kesehatan, serta penyehatan lingkungan.</li> </ul>	Dinas Kesehatan
<b>Sasaran 14 : Meningkatnya prosentase rumah dan lingkungan sehat.</b>				
1	Jamban Sehat	$\frac{\text{Jumlah Rumah dengan Jamban sehat disuatu wilayah dalam kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah Rumah yang diperiksa di satu wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu yang sama}} \times 100\%$	Untuk mengukur cakupan jamban sehat di Kab. Bantul.	Dinas Kesehatan
2	Meningkatnya cakupan air bersih.	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang mempunyai akses air bersih disuatu wilayah dalam kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah yang diperiksa disuatu wilayah dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	Untuk mengukur cakupan air bersih rumah tangga dimana air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia	Dinas Kesehatan
3	Meningkatnya cakupan rumah sehat	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memenuhi persyaratan sanitasi disuatu wilayah dalam kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah yang diperiksa disuatu wilayah dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	Untuk mengukur prosentase rumah sehat dimana dengan rumah sehat diharapkan penyakit berbasis lingkungan dapat dicegah.	Dinas Kesehatan

4	Pengembangan ipal komunal	Jumlah Instalasi air limbah komunal yang terbangun (unit)	Mengukur kinerja organisasi dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan limbah rumah tangga secara terpadu di Kab. Bantul.	DPU
5	Penanganan sampah	$\frac{\text{Jumlah sampah yang masuk ke TPA}}{\text{Jumlah Produksi sampah di Kabupaten Bantul.}} \times 100\%$	Mengukur kinerja organisasi dalam penanganan sampah di Kab. Bantul..	DPU
<b>Sasaran 15 : Semua penduduk memiliki jaminan kesehatan</b>				
1	Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan disuatu wilayah}}{\text{Jumlah seluruh penduduk diwilayah dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	Untuk mengetahui jumlah penduduk yang telah memiliki jaminan kesehatan	Dinas Kesehatan
<b>Sasaran 16 : Meningkatnya kualitas pendidikan</b>				
1	Angka Melek huruf	$\frac{\text{Jumlah penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bisa menulis pada tahun t}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas}} \times 100\%$	Untuk mengetahui banyaknya penduduk yang buat huruf disuatu daerah sehingga dapat ditentukan cara penanggulangannya atau melek huruf sehingga dapat dijadikan daerah percontohan.	Dikmenof
2	APK (SMA/SMK/MA/Paket C)	$\frac{\text{Jumlah Siswa jenjang SMA/SMK/MA/Paket C}}{\text{Jumlah Penduduk kelompok usia 16-18 tahun.}} \times 100\%$	Untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di jenjang SMA/SMK/MA/ Paket C.	Dikmenof
3	APK TK/PAUD	$\frac{\text{Jumlah siswa jenjang TK/PAUD}}{\text{Jumlah usia 0-6 tahun}} \times 100\%$	Untuk mengetahui banyak anak yang bersekolah di TK/PAUD.	Dikmenof

4	APK SD/MI	$\frac{\text{Jumlah siswa jenjang SD/MI/Paket A}}{\text{Jumlah usia penduduk kelompok usia 7 -12 tahun}} \times 100\%$	Untuk mengetahui banyak anak yang bersekolah di suatu jenjang SD/MI/paket A. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di daerah.	Dikdas
5	APK SMP/MTS	$\frac{\text{Jumlah siswa SMP/MTS/Paket B}}{\text{Jumlah usia penduduk kelompok usia 13 -15 tahun}} \times 100\%$	Untuk mengetahui banyak anak yang bersekolah di suatu jenjang SMP/MTS/Paket B. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di daerah.	Dikdas
6	APK SMA/SMK	$\frac{\text{Jumlah Siswa jenjang SMA/SMK}}{\text{Jumlah Penduduk kelompok usia 16-18 tahun.}} \times 100\%$	Untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah disuatu jenjang SMA/SMK/MA/ Paket C.	Dikmenof
7	APM SD/MI	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7-12 tahun jenjang SD/MI/Paket A}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100\%$	Untuk mengetahui banyaknya anak usia 7-12 tahun yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan.	Dikdas
8	APM SMP/MTS	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13-15 tahun jenjang SMP/MTs/Paket B}}{\text{Jumlah penduduk usia 13-15 tahun}} \times 100\%$	Untuk mengetahui banyaknya anak usia 13-15 tahun yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan.	Dikdas
9	APM SMA/SMK	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 16-18 tahun di jenjang SMA/SMK/MA/Paket C}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun.}} \times 100\%$	Untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang yang bersekolah dijenjang SMA/SMK.	Dikmenof
10	Tingkat kelulusan SD/MI	$\frac{\text{Jumlah lulusan SD/MI tahun ajaran sebelumnya}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya.}} \times 100\%$	Untuk mengetahui banyaknya siswa yang lulus dari jenjang pendidikan tertentu di suatu daerah.	Dikdas

11	Tingkat kelulusan SMP/MTS	$\frac{\text{Jumlah lulusan SMP/MTS tahun ajaran sebelumnya}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTS pada tahun ajaran sebelumnya.}} \times 100\%$	Untuk mengetahui banyaknya siswa yang lulus dari jenjang pendidikan tertentu di suatu daerah.	Dikdas
12	Tingkat kelulusan SMA/SMK	$\frac{\text{Jumlah lulus pada jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya.}} \times 100\%$	Untuk mengetahui banyaknya siswa yang lulus dari jenjang pendidikan tertentu di suatu daerah.	Dikmenof
13	Nilai NEM Rata-rata SD/MI	$\frac{\text{Jumlah keseluruhan hasil NEM}}{\text{Jumlah SD/MI}} \times 100\%$	Untuk mengetahui rata-rata hasil NEM pada suatu jenjang pendidikan SD/MI.	Dikdas
14	Nilai NEM Rata-rata SMP/MTS	$\frac{\text{Jumlah keseluruhan hasil NEM}}{\text{Jumlah SMP/MTS}} \times 100\%$	Untuk mengetahui rata-rata hasil NEM pada suatu jenjang pendidikan SMP/MTS.	Dikdas
15	Nilai NEM Rata-rata SMA/SMK	$\frac{\text{Rata2 NEM lulusan}}{\text{Rata2 NEM siswa baru}}$ NEM L/SB: -----	Untuk mengetahui adanya peningkatan mutu sekolah di lihat dari rata-rata NEM lulusan dengan rata-rata NEM masukan.	Dikmenof
16	Angka Putus Sekolah SD/MI	$\frac{\text{Jumlah putus sekolah pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya.}} \times 100\%$	Untuk mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah disuatu daerah sehingga dapat ditentukan cara penanggulangannya.	Dikdas
17	Angka Putus Sekolah SMP/MTS	$\frac{\text{Jumlah putus sekolah pada jenjang SMP/MTS}}{\text{Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTS pada tahun ajaran sebelumnya.}} \times 100\%$	Untuk mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah disuatu daerah sehingga dapat ditentukan cara penanggulangannya.	Dikdas
18	Angka Putus Sekolah SMA/SMK	$\frac{\text{Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya.}} \times 100\%$	Untuk mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah disuatu daerah sehingga dapat ditentukan cara penanggulangannya.	Dikmenof

19	Angka rata2 lama sekolah SD/MI	Rata-rata lama belajar yang diperlukan siswa sampai lulus sekolah pada jenjang yang diberikan pada suatu jenjang pendidikan.	Untuk mengetahui berapa lama suatu jenjang pendidikan dapat terselesaikan sampai lulus.	Dikdas
20	Angka rata2 lama sekolah SMP/MTS	Rata-rata lama belajar yang diperlukan siswa sampai lulus sekolah pada jenjang yang diberikan pada suatu jenjang pendidikan.	Untuk mengetahui berapa lama suatu jenjang pendidikan dapat terselesaikan sampai lulus.	Dikdas
21	Angka rata2 lama sekolah SMA/MA/SMK	<p style="text-align: center;">Jumlah (lulusan I x 3)+(lulusan II x 4)+(lulusan III x 5)*</p> <p style="text-align: center;">RLB1-smp/sm: -----</p> <p style="text-align: center;">Jumlah lulusan I+II+III</p>	Untuk mengetahui lama belajar siswa sampai lulus, lama belajar sampai putus sekolah, dan rata-rata lama belajar gabungan antara lulus dan putus sekolah	Dikmenof
<b>Sasaran 17 : Meningkatnya kualitas perpustakaan.</b>				
1	Jumlah Koleksi Buku	$\frac{\text{Jumlah koleksi buku pada kurun waktu tertentu}}{\text{Rencana jumlah buku kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	Mengukur sarana yang diperlukan untuk membentuk perpustakaan yang handal dan berkualitas.	Kantor Perpustakaan
2	Jumlah pengunjung perpustakaan (termasuk perpustakaan keliling)	$\frac{\text{Jumlah pengunjung perpustakaan dalam kurun waktu tertentu}}{\text{Rencana jumlah pengunjung perpustakaan dalam kurun waktu tertentu}} \times 100\%$	Untuk mengukur tinggi rendahnya minat baca masyarakat	Kantor Perpustakaan
<b>Sasaran 18 : Meningkatnya sekolah berkualitas</b>				
1	Rasio ruang kelas – siswa. SD/MI	$\frac{\text{Jumlah ruang kelas SD/MI}}{\text{Jumlah siswa. SD/MI}} \times 100\%$	Untuk mengetahui jumlah ruang kelas siswa yang tersedia pada suatu jenjang SD/MI	Dikdas
2	Rasio ruang kelas – siswa SMP/MTS	$\frac{\text{Jumlah ruang kelas SMP/MTS}}{\text{Jumlah siswa. SMP/MTS}} \times 100\%$	Untuk mengetahui jumlah ruang kelas siswa yang tersedia pada suatu jenjang SMP/MTS	Dikdas

3	Rasio ruang kelas –siswa SMA/SMK	$\frac{\text{Jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu}}{\text{Jumlah kelas pada jenjang pendidikan tertentu}}$	Untuk mengetahui rata-rata besarnya kelas disuatu daerah	DikMen
4	Rasio Guru-Siswa SD/MI	$\frac{\text{Jumlah Guru SD/MI}}{\text{Jumlah Siswa SD/MI}} \times 100\%$	Untuk mengetahui perbandingan antara jumlah guru yang tersedia dibandingkan dengan jumlah siswa yang ada.	Dikdas
5	Rasio Guru-siswa SMP/MTS	$\frac{\text{Jumlah Guru SMP/MTS}}{\text{Jumlah seluruh siswa SMP/MTS}} \times 100\%$	Untuk mengetahui perbandingan antara jumlah guru yang tersedia dibandingkan dengan jumlah siswa yang ada.	Dikdas
6	Rasio Guru-siswa SMA/SMK	$\frac{\text{Jumlah Guru SMA/SMK}}{\text{Jumlah Guru SMA/SMK}} \times 100\%$	Untuk mengetahui perbandingan antara jumlah guru dengan siswa.	DikMen
7	Jumlah SNP SMA/SMK	$\frac{\text{Jumlah SMA/SMK kategori SNP}}{\text{Jumlah SMA/SMK}} \times 100\%$	Untuk mengetahui banyaknya SMA/SMK yang termasuk kategori SNP.	Dikmenof
<b>Sasaran 19 : Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan non formal dan informal</b>				
1	Jumlah lembaga pendidikan Non Formal yang aktif melaksanakan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah lembaga pendidikan Nonformal yang aktif melaksanakan kegiatan}}{\text{Jumlah lembaga pendidikan Nonformal}} \times 100\%$	Untuk mengetahui jumlah lembaga pendidikan non formal yang aktif melaksanakan kegiatan	Dikmenof
2	Jumlah lembaga pendidikan In Formal yang aktif melaksanakan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah lembaga pendidikan Informal yang aktif melaksanakan kegiatan}}{\text{Jumlah lembaga pendidikan Informal}} \times 100\%$	Untuk mengetahui informal yang aktif melaksanakan kegiatan	Dikmenof

<b>Sasaran 20 : Meningkatnya Prestasi pemuda Kab. Bantul dibidang olahraga secara kuantitatif dan kualitatif</b>				
1	Jumlah perolehan Emas melalui kompetisi Porprop.	$\frac{\text{Jumlah Perolehan Emas PORPROP}}{\text{Jumlah Target Perolehan Emas PORPROP}} \times 100\%$	Untuk mengukur keberhasilan atlet tingkat Propinsi.	Kantor Pora
2	Kompetisi olahraga tingkat propinsi 2 tahun sekali (POP)	$\frac{\text{Jumlah Perolehan Emas POP}}{\text{Jumlah Target Perolehan Emas POP}} \times 100\%$	Untuk mengukur keberhasilan atlet pelajar tingkat Propinsi.	Kantor Pora
3	Paskibraka	$\frac{\text{Jumlah Pelajar yang lolos seleksi Paskibraka}}{\text{Jumlah Pelajar yang mengikuti seleksi}} \times 100\%$	Munculnya generasi muda dan pelajar dalam mengikuti kegiatan kepemudaan, bela negara dan partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.	Kantor Pora
4	Pemuda pelopor	$\frac{\text{Jumlah Pemuda pelopor}}{\text{Jumlah Pemuda yang mengikuti seleksi pemuda pelopor}} \times 100\%$	Munculnya generasi Muda dan pelajar dalam mengikuti kegiatan kepemudaan, bela negara dan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan	Kantor Pora
5	MTQ tingkat pelajar umum	$\frac{\text{Realisasi perolehan medali Emas melalui kegiatan MTQ tingkat pelajar umum di propinsi}}{\text{Jumlah target perolehan medali Emas melalui kegiatan MTQ tingkat pelajar umum di propinsi}} \times 100\%$	Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan pelajar.	Kantor Pora
<b>Sasaran 21 : Meningkatnya kualitas pemuda dan olahragawan Profesional</b>				
1	Prosentase cabang olah raga yang menjalankan kompetisi secara teratur	$\frac{\text{Jumlah cabang olah raga yang menjalankan kompetisi secara teratur}}{\text{Jumlah cabang olah raga yang menjalankan kompetisi secara teratur}} \times 100\%$	Mengukur potensi cabang Olah raga di Kabupaten Bantul	Kantor Pora
<b>Sasaran 22 : Meningkatnya kualitas data base dalam format digital disemua sector</b>				
1	Analisa dan perancangan database terintegrasi semua sektor	$\frac{\text{Analisa dan perencanaan data base target pelaksanaan selama 4 tahun ke depan}}{\text{target pelaksanaan selama 4 tahun ke depan}} \times 100\%$	Mengukur peningkatan database di berbagai sektor sebagai pendukung pengambilan keputusan.	KPDT

<b>Sasaran 23 : Pengembangan sistem informasi yang berbasis teknologi Informasi dan Komunikasi(TIK)</b>				
1	Prosentase penyusunan SOP pengembangan Sistem Informasi.	<u>Rencana Penyusunan SOP Pengembangan Sistem Informasi</u> x 100% Target SOP yang akan dibuat. (2011-2012)	Memberikan Regulasi terhadap TI	KPDT
2	Prosentase Pengembangan Pusat data	<u>Analisa dan perencanaan data base</u> x 100% Target pelaksanaan selama 4 tahun kedepan	Mengukur kemampuan kinerja SKPD berdasarkan kualitas data.	KPDT
<b>Sasaran 24: Tersedianya Informasi melalui media massa tepat guna</b>				
1	Prosentase sosialisasi penyelenggaraan pemerintah daerah.	<u>Pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah</u> x 100% Target pelaksanaan sosialisasi dalam kurun waktu 5 tahun.	Mengukur peningkatan pemahaman masyarakat terhadap program kerja SKPD.	KPDT
<b>Sasaran 25 : Meningkatnya jumlah DBKS.</b>				
1	Jumlah DBKS (Desa binaan keluarga sakinah)	<u>Jumlah DBKS tahun n – (jumlah DBKS tahun n – 1)</u> x 100% Jumlah DBKS tahun n – 1	Mengukur peningkatan DBKS. Dengan DBKS diharapkan semua pemeluk agama dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman.	Dinas Sosial
<b>Sasaran 26 : Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama.</b>				
1	Jumlah dai dan pemuka agama yang diberikan pembekalan masalah kerukunan umat beragama	<u>Jumlah dai &amp; pemuka agama tahun n – ( jumlah tahun n -1)</u> x 100% Jumlah dai & pemuka agama tahun n - 1	Mengukur peningkatan jumlah dai & pemuka agama. Dengan bertambahnya jumlah dai dan pemuka agama maka pemahaman masyarakat tentang kerukunan umat beragama juga meningkat.	Dinas Sosial

2	Jumlah lembaga agama yang diberikan pembinaan	$\frac{\text{Jumlah lembaga agama tahun } n - (\text{jumlah tahun } n - 1)}{\text{Jumlah lembaga agama tahun } n} \times 100\%$	Mengukur caakupan layanan dan bantuan bagi tempat ibadah. Dengan adanya peningkatan fasilitas tempat ibadah maka akan meningkatkan kenyamanan umat dalam menjalankan ibadahnya.	Dinas Sosial
3	Peningkatan kerukunan hidup Umat beragama	$\frac{\text{Jumlah kegiatan FKUB}}{\text{Jumlah target kegiatan FKUB}} \times 100\%$	Masih adanya kasus kasus yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama.	Kan. Kesbangpolinmas beragama.
<b>Sasaran 27 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah.</b>				
1	Pertumbuhan PDRB (ekonomi) (Pertumbuhan Domestik Regional Bruto)	$\frac{\text{Jumlah PDRB tahun ini dikurangi tahun lalu}}{\text{Jumlah PDRB tahun lalu}} \times 100\%$	Untuk mengukur pengukur tingkat PDRB di Kabupaten Bantul	Bappeda
2	PBRD atas dasar harga konstan	$\frac{\text{PDRB } t - \text{PDRB } t-1}{\text{PDRB } t-1}$	Mengukur peningkatan produk barang dan jasa di Kab. Bantul pada tahun t berdasarkan harga tahun 2000	Bappeda
3	PBRD atas dasar harga berlaku	$\frac{\text{PDRB } t - \text{PDRB } t-1}{\text{PDRB } t-1}$	Mengukur peningkatan produk barang dan jasa di Kab. Bantul ppada tahun t pada harga tahun berjalan.	Bappeda
4	Penerimaan Daerah	Jumlah Penerimaan Daerah pada tahun t	Mengukur penerimaan Daerah di Kabupaten Bantul.	DPKAD
5	Pertumbuhan Investasi PMA	$\frac{\text{Jumlah Investasi PMA tahun ini} - \text{Jumlah Investasi PMA tahun lalu}}{\text{Jumlah Investasi PMA tahun lalu}} \times 100\%$	Untuk mengukur pertumbuhan investasi PMA di Kabupaten Bantul.	Dinas Perindakop.
6	Pertumbuhan Investasi PMDN	$\frac{\text{Jumlah Investasi PMDN tahun ini} - \text{Jumlah Investasi PMDN tahun lalu}}{\text{Jumlah Investasi PMDN tahun lalu}} \times 100\%$	Untuk mengukur pertumbuhan investasi PMD di Kabupaten Bantul.	Dinas Perindakop.

7	Pertumbuhan Investasi Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Investasi masyarakat tahun ini} - \text{Jumlah Investasi masyarakat tahun lalu}}{\text{Jumlah Investasi masyarakat tahun lalu}} \times 100\%$	Untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.	Bagian AP
8	Inflasi	Tingkat Inflasi IHK periode n – IHK tahun sebelumnya.	Mengukur tingkat perkembangan harga barang	Bappeda
9	Peningkatan kualitas SDM BUMD guna peningkatan pelayanan investasi	$\frac{\text{Realisasi pembekalan kualitas SDM BUMD}}{\text{Pembekalan kualitas SDM BUMD}} \times 100\%$	Sebagian badan pembinaan BUMD maka untuk peningkatan pelayanan dan kinerja BUMD perlu dilakukan pembinaan/ pembekalan manajemen serta studi banding.	Bagian KPPD
10	Fasilitasi dan koordinasi kerjasama bidang investasi	$\frac{\text{Realisasi pemberian insentif dan BH dalam kemudahan penanaman modal}}{\text{Target kajian pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal Daerah}} \times 100\%$	Untuk mengetahui data dan informasi, bahan penyusunan kebijakan, dan kajian dibidang pengembangan investasi. Maka kegiatan fasilitasi dan koordinasi kerjasama dibidang investasi perlu dilaksanakan.	Bagian KPPD
<b>Sasaran 28 : Mempermudah akses dan sarana distribusi pangan serta akses sarana dan prasarana produksi pertanian serta perikanan dan kelautan.</b>				
1	Ketersediaan pangan	$\frac{\text{Produksi bersih}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	Untuk mengetahui ketersediaan pangan bagi rakyat sehingga dapat diketahui kondisi pangan dimasyarakat.	Badan Ketahanan Pangan
2	Desa Mandiri Pangan	$\frac{\text{Jumlah desa mandiri pangan tahun ini} - \text{Desa mandiri pangan tahun lalu}}{\text{Desa mandiri pangan tahun lalu}} \times 100\%$	Untuk mengetahui Desa-desa tersebut apakah masyarakat sudah mampu membeli pangan secara cukup bagi kebutuhan tubuh baik secara kualitas maupun kuantitas.	Badan Ketahanan Pangan

3	Akses Pangan	$\frac{\text{Jumlah kelompok akses pangan tahun ini} - \text{Jumlah kelompok akses pangan tahun lalu}}{\text{Jumlah kelompok akses pangan tahun lalu}} \times 100\%$	Untuk mengetahui bahwa daerah rawan (minus) pangan dalam menyediakan cadangan pangan bagi masyarakat.	Badan Ketahanan Pangan
4	PPH (Pola Pangan Harapan)	Hasil perhitungan keseluruhan konsumsi energi dan protein	Untuk mengetahui konsumsi pangan terutama energi dan protein sesuai dengan kebutuhan bagi tubuh (seseorang)	Badan Ketahanan Pangan
5	Konsumsi Ikan Perkapita	$\frac{\text{Jumlah konsumsi ikan (Kg/kapita)}}{\text{Target Daerah (kg/kapita)}} \times 100\%$	Semakin banyak produksi perikanan, maka semakin meningkatkan juga konsumsi akan ikan. Peningkatan konsumsi ikan akan berdampak pada pendapatan masyarakat nelayan/pembudidaya sehingga kesejahteraan meningkat.	Dinas Perikanan dan Kelautan
6	Saluran irigasi dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang saluran premier dan sekunder dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah panjang saluran primer dan sekunder}} \times 100\%$	Untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat petani.	SDA
7	Prosentase luasan DI yang terlayani air irigasi	$\frac{\text{Luas sawah yang terairi}}{\text{Total luas persawahan beririgasi}} \times 100\%$	Untuk meningkatkan produktifitas petani.	SDA
8	Pembangunan Bantul seed centre	$\frac{\text{Jumlah komoditas yang dikembangkan penangkarannya (komoditas)}}{\text{Target daerah (komoditas)}} \times 100\%$	Menunjukkan keberhasilan dalam menyediakan kebutuhan lokal akan ketersediaan benih pertanian yang unggul dan berkualitas serta mengembangkan pusat perbenihan	Dinas Pertanian dan Kehutanan
9	Penanganan dalam rangka kestabilan harga jual hasil pertanian (program paska panen) all: Padi, kedelai, jagung, kacang tanah, cabe dan bawang merah	$\frac{\text{Jumlah komoditas dengan harga jual} \leq \text{BEP/HPP (komoditas)}}{\text{Target daerah (komoditas)}} \times 100\%$	Mengetahui kinerja dalam menjaga kestabilan harga 6 komoditas utama pertanian daerah sehingga mencegah kerugian di pihak petani	Dinas Pertanian dan Kehutanan

<b>Sasaran 29 : Meningkatnya Produksi bahan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan serta agropolitan</b>				
1	Jumlah produksi perikanan budi daya	$\frac{\text{Jumlah produksi ikan budi daya (Ton)}}{\text{Target daerah (Ton)}} \times 100\%$	Mengukur keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan dapat dilihat dari peningkatan produksi perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan produksi	Dinas Perikanan dan Kelautan
2	Jumlah produksi perikanan tangkap	$\frac{\text{Jumlah produksi ikan tangkap (Ton)}}{\text{Target daerah (Ton)}} \times 100\%$	Mengukur keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan dapat dilihat dari peningkatan produksi perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan produksi	Dinas Perikanan dan Kelautan
3	Jumlah Pokdakan (kelompok budidaya)	$\frac{\text{Jumlah pokdakan (kelompok)}}{\text{Target daerah (kelompok)}} \times 100\%$	Untuk mengukur tingkat ketertarikan masyarakat dalam usaha dibidang perikanan.	Dinas Perikanan dan Kelautan
4	Produktifitas Gabah Kering Pungut (GKP)	$\frac{\text{Produktivitas Gabah Kering Pungut / GKP (kw/ha)}}{\text{Target daerah (kw/ha)}} \times 100\%$	Mengetahui kinerja dalam meningkatkan produksi bahan pangan pertanian melalui pemenuhan target produktifitas gabah kering pungut (GKP)	Dinas Pertanian dan Kehutanan
5	Produktifitas jagung (pipil kering)	$\frac{\text{Produktivitas jagung pipil kering (kw/ha)}}{\text{Target daerah (kw/ha)}} \times 100\%$	Mengetahui kinerja dalam meningkatkan produksi bahan pangan pertanian melalui pemenuhan target produktifitas jagung pipil kering	Dinas Pertanian dan Kehutanan
6	Produktifitas kedelai (wose)	$\frac{\text{Produktivitas kedelai (kw/ha)}}{\text{Target daerah (kw/ha)}} \times 100\%$	Mengetahui kinerja dalam meningkatkan produksi bahan pangan pertanian melalui pemenuhan target produktifitas kedelai	Dinas Pertanian dan Kehutanan

7	Produktifitas kacang tanah (wose)	$\frac{\text{Produktivitas kacang tanah (kw/ha)}}{\text{Target daerah (kw/ha)}} \times 100\%$	Mengetahui kinerja dalam meningkatkan produksi bahan pangan pertanian melalui pemenuhan target produktifitas kacang tanah	Dinas Pertanian dan Kehutanan
8	Produktifitas bawang merah	$\frac{\text{Produktivitas bawang merah (ton/ha)}}{\text{Target daerah (ton/ha)}} \times 100\%$	Mengetahui kinerja dalam meningkatkan produksi hortikultura melalui pemenuhan target produktifitas bawang merah	Dinas Pertanian dan Kehutanan
9	Produktifitas cabe merah	$\frac{\text{Produktivitas cabe merah (ton/ha)}}{\text{Target daerah (ton/ha)}} \times 100\%$	Mengetahui kinerja dalam meningkatkan produksi hortikultura melalui pemenuhan target produktifitas cabe merah	Dinas Pertanian dan Kehutanan
10	Produktifitas pisang	$\frac{\text{Produktivitas pisang (kg/pohon)}}{\text{Target daerah (kg/pohon)}} \times 100\%$	Mengetahui kinerja dalam meningkatkan produksi hortikultura melalui pemenuhan target produktifitas pisang	Dinas Pertanian dan Kehutanan
11	Produktifitas Jamur	$\frac{\text{Produktivitas jamur tiram (kg/m}^2\text{)}}{\text{Target daerah (kg/m}^2\text{)}} \times 100\%$	Mengetahui kinerja dalam meningkatkan produksi hortikultura melalui pemenuhan target produktifitas cabe merah	Dinas Pertanian dan Kehutanan
12	Produktifitas tebu (hablor gula)	$\frac{\text{Produktivitas tebu (kw/ha)}}{\text{Target daerah (kw/ha)}} \times 100\%$	Mengetahui kinerja dalam meningkatkan produksi perkebunan melalui pemenuhan target produktifitas tebu	Dinas Pertanian dan Kehutanan
13	Produktifitas kelapa (kopra)	$\frac{\text{Produktivitas kelapa (kw/ha)}}{\text{Target daerah (kw/ha)}} \times 100\%$	Mengetahui kinerja dalam meningkatkan produksi perkebunan melalui pemenuhan target produktifitas kelapa	Dinas Pertanian dan Kehutanan

14	Produktifitas tembakau (Rajang kering)	$\frac{\text{Produktivitas tembakau (kw/ha)}}{\text{Target daerah (kw/ha)}} \times 100\%$	Mengetahui kinerja dalam meningkatkan produksi perkebunan melalui pemenuhan target produktifitas tembakau	Dinas Pertanian dan Kehutanan
15	Produktifitas jambu mete (glondong mete)	$\frac{\text{Produktivitas jambu mete (kw/ha)}}{\text{Target daerah (kw/ha)}} \times 100\%$	Mengetahui kinerja dalam meningkatkan produksi perkebunan melalui pemenuhan target produktifitas jambu mete	Dinas Pertanian dan Kehutanan
16	Produksi daging (kambing, sapi, domba, dan unggas)	$\frac{\text{Produksi daging (kambing, sapi, domba, dan unggas) (kg)}}{\text{Target daerah (kg)}} \times 100\%$	Mengetahui ketersediaan pangan produk hewani dalam hal produksi daging (kambing, sapi, domba, dan unggas) daerah	Dinas Pertanian dan Kehutanan
17	Produksi telur (ayam dan itik)	$\frac{\text{Produksi telur (ayam dan itik) (kg)}}{\text{Target daerah (kg)}} \times 100\%$	Mengetahui ketersediaan pangan produk hewani dalam hal produksi telur (ayam dan itik) daerah	Dinas Pertanian dan Kehutanan
18	Produksi susu (sapi perah dan kambing PE)	$\frac{\text{Produksi susu (sapi perah dan kambing PE) (liter)}}{\text{Target daerah (liter)}} \times 100\%$	Mengetahui ketersediaan pangan produk hewani dalam hal produksi susu (sapi perah, kambing PE)	Dinas Pertanian dan Kehutanan
19	Populasi sapi potong	$\frac{\text{Populasi sapi potong (ekor)}}{\text{Target populasi sapi potong daerah (ekor)}} \times 100\%$	Mengetahui kinerja pembangunan peternakan dalam hal peningkatan jumlah populasi sapi potong daerah	Dinas Pertanian dan Kehutanan
20	Populasi sapi perah	$\frac{\text{Populasi sapi perah (ekor)}}{\text{Target populasi sapi perah daerah (ekor)}} \times 100\%$	Mengetahui kinerja pembangunan peternakan dalam hal peningkatan jumlah populasi sapi perah daerah	Dinas Pertanian dan Kehutanan
21	Populasi kambing	$\frac{\text{Populasi kambing (ekor)}}{\text{Target populasi kambing daerah (ekor)}} \times 100\%$	Mengetahui kinerja pembangunan peternakan dalam hal peningkatan jumlah populasi kambing daerah	Dinas Pertanian dan Kehutanan

22	Populasi Domba	$\frac{\text{Populasi domba (ekor)}}{\text{Target populasi domba daerah (ekor)}} \times 100\%$	Mengetahui kinerja pembangunan peternakan dalam hal peningkatan jumlah populasi domba daerah	Dinas Pertanian dan Kehutanan
23	Populasi ayam buras	$\frac{\text{Populasi ayam buras (ekor)}}{\text{Target populasi ayam buras daerah (ekor)}} \times 100\%$	Mengetahui kinerja pembangunan peternakan dalam hal peningkatan jumlah populasi ayam buras daerah	Dinas Pertanian dan Kehutanan
24	Populasi ayam ras petelur	$\frac{\text{Populasi ayam ras petelur (ekor)}}{\text{Target populasi ayam ras petelur daerah (ekor)}} \times 100\%$	Mengetahui kinerja pembangunan peternakan dalam hal peningkatan jumlah populasi ayam ras petelur daerah	Dinas Pertanian dan Kehutanan
25	Populasi ayam ras pedaging	$\frac{\text{Populasi ayam ras pedaging (ekor)}}{\text{Target populasi ayam ras pedaging daerah (ekor)}} \times 100\%$	Mengetahui kinerja pembangunan peternakan dalam hal peningkatan jumlah populasi ayam ras pedaging daerah	Dinas Pertanian dan Kehutanan
26	Populasi itik	$\frac{\text{Populasi itik (ekor)}}{\text{Target populasi itik daerah (ekor)}} \times 100\%$	Mengetahui kinerja pembangunan peternakan dalam hal peningkatan jumlah populasi itik daerah	Dinas Pertanian dan Kehutanan
<b>Sasaran 30 : Terkendalinya laju alih fungsi lahan pertanian</b>				
1	Konversi lahan	$\frac{\text{Penurunan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian (\%)}}{\text{Target daerah (\%)}} \times 100\%$	Menunjukkan kinerja dalam pencegahan alih fungsi lahan pertanian produktif ke non pertanian	Dinas Pertanian dan Kehutanan
<b>Sasaran 31 : Meningkatnya program usaha tani dan aktivitas kelembagaan petani dan penyuluh..</b>				
1	Peningkatan kelembagaan petani aktifitas	$\frac{\text{Jumlah kelompok petani yang aktif}}{\text{Jumlah kelompok petani}} \times 100\%$	Untuk mengetahui peningkatan aktifitas dan kemampuan kelompok tani.	Badan Ketahanan Pangan

2	Peningkatan kualitas penyuluh	$\frac{\text{Jumlah penyuluh yang mengikuti pelatihan tahun ini}}{\text{Jumlah penyuluh yang mengikuti pelatihan}}$	Untuk mengetahui peningkatan kualitas penyuluh	Badan Ketahanan Pangan
3	Peningkatan kapasitas SDM P3A dalam pengelolaan irigasi	$\frac{\text{Kelompok P3A (kelompok)}}{\text{Target daerah (kelompok)}} \times 100\%$	Mengetahui kinerja dinas dalam peningkatan kapasitas SDM P3A dalam pengelolaan irigasi	Dinas Pertanian dan Kehutanan
<b>Sasaran 32 : Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi antara lain pasar, terminal, jalan, dan lain-lain.</b>				
1	Prosentase panjang jaringan jalan beraspal dalam kondisi baik.	$\frac{\text{Jumlah /panjang jalan dalam kondisi baik}}{\text{Panjang jalan Kabupaten}} \times 100\%$	Mengukur kinerja organisasi dalam penanganan jalan/akses transportasi di Kabupaten Bantul.	DPU
2	Prosentase peningkatan penyediaan simpul transportasi	$\frac{\text{Jumlah simpul yang ada}}{\text{Jumlah simpul yang dibutuhkan}} \times 100\%$	Untuk mengukur kinerja dinas dalam menyediakan fasilitas simpul transportasi.	Dinas Perhubungan
3	Prosentase Keselamatan Lalulintas ( Rambu )	$\frac{\text{Jumlah rambu yang terpasang tahun ke- n}}{\text{Jumlah rambu yang dibutuhkan}} \times 100\%$	Untuk mengukur kinerja dinas dalam menyediakan rambu lalulintas yang memadai.	Dinas Perhubungan
4	Prosentase Keselamatan Lalulintas ( Marka )	$\frac{\text{Jumlah Marka yang terpasang tahun ke- n}}{\text{Jumlah Marka yang dibutuhkan}} \times 100\%$	Untuk mengukur kinerja dinas dalam menyediakan marka jalan yang memadai.	Dinas Perhubungan
5	Prosentase Keselamatan Lalulintas ( APILL )	$\frac{\text{Jumlah APILL yang terpasang tahun ke- n}}{\text{Jumlah APILL yang dibutuhkan}} \times 100\%$	Untuk mengukur kinerja dinas dalam menyediakan APILL lalu lintas yang memadai.	Dinas Perhubungan
6	Daya angkut angkutan umum.	Jumlah penumpang yang terangkut pada tahun ke- n	Sebagai focus pelayanan dan optimalisasi jaringan angkutan dalam melayani pergerakan orang dan barang.	Dinas Perhubungan

7	Load Factor Penumpang angkutan umum	$\frac{\text{Jumlah penumpang tahun ke - n}}{\text{Kapasitas}} \times 100\%$	Merupakan alat control/ pengawasan terhadap penyediaan jasa angkutan dan dasar penentu pengembangan dan perencanaan transportasi.	Dinas Perhubungan
8	Jumlah TPA sampah dengan system sanitary landfill	Jumlah TPA sampah dengan system sanitary landfill di Kabupaten Bantul	Mengukur kinerja organisasi dalam penyediaan sarana pengelolaan sampah di kabupaten Bantul.	Dinas Pekerjaan Umum
9	Kondisi setiap pasar dalam keadaan baik.	$\frac{\text{Jumlah pasar dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah pasar keseluruhan}} \times 100\%$	Mengetahui adanya peningkatan kondisi fisik pasar berdasarkan standar kebersihan/kriteria pasar	Kantor Pengelolaan Pasar
<b>Sasaran 33 : Meningkatnya unit-unit usaha industri kecil dengan mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal, inovasi produk, akses permodalan serta perluasan jangkauan pemasaran.</b>				
1	Fasilitasi dan Pembinaan unit usaha ber - TDI	$\frac{\text{Jumlah unit usaha ber - TDI tahun yang dievaluasi} - \text{Jumlah unit usaha ber TDI tahun lalu}}{\text{Jumlah unit usaha ber-TDI tahun lalu}} \times 100\%$	Terwujudnya peningkatan unit usaha ber- TDI	Dinas Perindagkop
2	Fasilitasi dan Pembinaan unit usaha ber -IUI	$\frac{\text{Jumlah unit usaha ber - IUI tahun yang dievaluasi} - \text{Jumlah unit usaha ber-IUI tahun lalu}}{\text{Jumlah unit usaha ber- IUI tahun lalu}} \times 100\%$	Terwujudnya peningkatan unit usaha ber- IUI	Dinas Perindagkop
3	Fasilitasi dan Pembinaan unit usaha ber -SIUP	$\frac{\text{Jumlah unit usaha ber - SIUP tahun yang dievaluasi} - \text{Jumlah unit usaha ber-SIUP tahun lalu}}{\text{Jumlah unit usaha ber- SIUP tahun lalu}} \times 100\%$	Terwujudnya peningkatan unit usaha ber- SIUP	Dinas Perindakop
4	Fasilitasi dan Pembinaan unit usaha ber -TDP	$\frac{\text{Jumlah unit usaha ber - TDP tahun yang dievaluasi} - \text{Jumlah unit usaha ber-TDP tahun lalu}}{\text{Jumlah unit usaha ber- TDP tahun lalu}} \times 100\%$	Terwujdnya peningkatan unit usaha ber- TDP	Dinas Perindakop
5	Fasilitasi dan Pembinaan unit usaha ber -TDG	$\frac{\text{Jumlah unit usaha ber - TDG tahun yang dievaluasi} - \text{Jumlah unit usaha ber-TDG tahun lalu}}{\text{Jumlah unit usaha ber- TDG tahun lalu}} \times 100\%$	Terwujudnya peningkatan unit usaha ber- TDG	Dinas Perindakop

6	Peningkatan kapasitas SDM UKM	$\frac{\text{Jumlah SDM yang dibina tahun yang dievaluasi} - \text{Jumlah SDM yang dibina tahun lalu}}{\text{Jumlah SDM yang dibina tahun lalu}} \times 100\%$	Terciptanya SDM berkualitas & mempunyai daya saing	Dinas Perindakop
7	Fasiltasi Peningkatan IRT	$\frac{\text{Jumlah unit usaha ber-IRT tahun yang dievaluasi} - \text{Jumlah unit usaha ber-IRT tahun lalu}}{\text{Jumlah unit usaha ber-IRT tahun lalu}} \times 100\%$	Terwujudnya peningkatan unit usaha ber-IRT	Dinas Perindakop
8	Fasiltasi Peningkatan Koperasi ber-BH	$\frac{\text{Jumlah koperasi ber-BH tahun yang dievaluasi} - \text{Jumlah Koperasi ber-BH tahun lalu}}{\text{Jumlah Koperasi ber-BH tahun lalu}} \times 100\%$	Tercapainya peningkatan kesejahteraan Koperasi & anggota	Dinas Perindakop
9	Meningkatnya penyerapan modal UKM	$\frac{\text{Jumlah modal yang terserap oleh UMKM}}{\text{Jumlah Pemohon Modal}} \times 100\%$	Untuk mengetahui banyaknya UKM yang menyerap modal	Dinas Perindakop
10	Peningkatan promosi melalui pameran	$\frac{\text{Jumlah program yg dilakukan melalui pameran tahun yg dievaluasi} - \text{jumlah program yg dilakukan melauti pameran tahun lalu}}{\text{Jumlah program yg dilakukan melalui pameran tahun lalu}} \times 100\%$	Tercapainya peningkatan penjualan produk	Dinas Perindakop
11	Peningkatan kualitas pasar tradisional	$\frac{\text{Jumlah pasar yg ditingkat kualitasnya tahun yg dievaluasi} - \text{Jumlah pasar yang ditingkatkan kualitasnya tahun lalu}}{\text{Jumlah pasar yg ditingkat kualitasnya tahun yg lalu}} \times 100\%$	Terwujudnya pasar tradisional yang dapat bersaing di pasar bebas	Dinas Perindakop
12	Peningkatan ketrampilan pelaku usaha Ekspor / pemasokan produk Ekspor	$\frac{\text{Pelaku usaha ekspor yg dilatih ketrampilan tahun yang dievaluasi} - \text{Pelaku usaha ekspor yang telah dilatih ketrampilan tahun lalu}}{\text{Pelaku usaha ekspor yang telah dilatih ketrampilan tahun lalu}} \times 100\%$	Terwujudnya peningkatan ketrampilan pelaku usaha.	Dinas Perindakop
14	Monitoring evaluasi dan pelaporan pameran produk UMKM.	$\frac{\text{Jumlah monitoring evaluasi dan pelaporan pameran produk UMKM}}{\text{Jumlah target monitoring evaluasi dan pelaporan pameran produk UMKM.}} \times 100\%$	Untuk mengetahui perkembangan UMKM	Dinas Perindakop
<b>Sasaran 34 : Meningkatkan Jumlah desa wisata, desa budaya, peristiwa budaya, penghargaan budaya, kelompok kesenian.</b>				
1	Jumlah Desa Wisata	$\frac{\sum \text{Desa Wisata tahun sekarang} - \sum \text{Desa Wisata tahun lalu}}{\sum \text{Desa wisata tahun lalu}} \times 100\%$	Untuk mengetahui peningkatan dan pengembangan jumlah desa wisata.	Dinas kebudayaan dan Pariwisata

2	Jumlah Peristiwa Budaya	$\frac{\sum \text{Peristiwa Budaya tahun sekarang} - \sum \text{Peristiwa Budaya tahun lalu}}{\sum \text{Peristiwa Budaya tahun lalu}} \times 100\%$	Untuk mengetahui peningkatan dan pengembangan jumlah Peristiwa Budaya	Dinas kebudayaan dan Pariwisata
3	Jumlah Kelompok Kesenian	$\frac{\sum \text{Kelompok Kesenian tahun sekarang} - \sum \text{Desa Budaya tahun lalu}}{\sum \text{Kelompok Kesenian tahun lalu}} \times 100\%$	Untuk mengetahui peningkatan dan pengembangan jumlah desa Budaya	Dinas kebudayaan dan Pariwisata
<b>Sasaran 35 : Meningkatnya jumlah pengunjung obyek wisata</b>				
1	Meningkatnya kunjungan wisata nusantara	$\frac{\sum \text{Kunjungan wisata nusantara tahun sekarang} - \sum \text{Kunjungan wisata nusantara tahun lalu}}{\sum \text{Kunjungan wisata nusantara tahun lalu}} \times 100\%$	Untuk mengukutingkat kunjungan wisata di Kab. Bantul.	Dinas kebudayaan dan Pariwisata
2	Meningkatnya kunjungan wisata Manca negara	$\frac{\sum \text{Kunjungan wisata Mancanegara tahun sekarang} - \sum \text{Kunjungan wisata Mancanegara tahun lalu}}{\sum \text{Kunjungan wisata nusantara tahun lalu}} \times 100\%$	Untuk mengukur tingkat kunjungan wisata di Kab. Bantul.	Dinas kebudayaan dan Pariwisata
<b>Sasaran 36 : Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan</b>				
1	Naiknya PAD pariwisata	$\frac{\sum \text{PAD pariwisata tahun sekarang} - \sum \text{PAD pariwisata tahun lalu}}{\sum \text{PAD pariwisata tahun lalu}} \times 100\%$	Untuk mengetahui peningkatan PAD	Dinas kebudayaan dan Pariwisata
2	Jumlah usaha pariwisata	$\frac{\text{Usaha pariwisata baru}}{\text{Usaha pariwisata yang ada}} \times 100\%$	Untuk mengetahui peningkatan investasi kepariwisataan.	Dinas kebudayaan dan Pariwisata
<b>Sasaran 37 : Berkembangnya kawasan KPY, pantai selatan.</b>				
1	Pengembangan kawasan KPY	Jumlah kegiatan yang dilakukan untuk mendukung kawasan KPY pada tahun t	Menghitung jumlah kegiatan yang dilakukan untuk mendukung kawasan KPY pada tahun t	Bappeda

2	Pengembangan kawasan Pantai Selatan	Jumlah kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pengembangan kawasan Pantai Selatan pada tahun t	Menghitung jumlah kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pengembangan kawasan Pantai Selatan pada tahun t	Bappeda
<b>Sasaran 38 : Meningkatnya ketrampilan pencari kerja.</b>				
1	Pelatihan bagi pencari kerja	$\frac{\text{Jumlah yang dilatih}}{\text{Pendaftaran pelatihan}} \times 100\%$	Untuk meningkatkan besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Dinas Nakertrans
<b>Sasaran 39 : Meningkatnya lapangan pekerjaan.</b>				
1	Jumlah angkatan kerja	$\frac{\text{Angkatan kerja}}{\text{Penduduk usia kerja}} \times 100\%$	Untuk mengukur perkiraan tingkat partisipasi angkatan kerja.	Dinas Nakertrans
2	Penempatan tenaga kerja	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja}}$	Untuk mengukur besaran pencari kerja yang ditempatkan.	Dinas Nakertrans
3	Perluasan kerja	$\frac{\text{Jumlah peserta program}}{\text{Jumlah pencari kerja}} \times 100\%$	Untuk mengukur besaran pencari kerja yang menerima program.	Dinas Nakertrans
4	Tingkat pengangguran	$\frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$	Untuk mengukur prosentase pengangguran dari angkatan kerja	Dinas Nakertrans
5	Prosentase bekerja terhadap angkatan kerja	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang bekerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	Untuk mengukur partisipasi orang yang bekerja	Dinas Nakertrans
<b>Sasaran 40 : Meningkatnya keamanan dan perlindungan tenaga kerja.</b>				
1	Jumlah Serikat Pekerja	$\frac{\text{Jumlah Serikat pekerja}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 100\%$	Untuk mengukur jumlah Serikat Pekerja.	Dinas Nakertrans

2	Jumlah Peraturan Perusahaan	$\frac{\text{Jumlah peraturan perusahaan}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 100\%$	Untuk mengukur jumlah peraturan perusahaan	Dinas Nakertrans
3	Jumlah Perjanjian Kerja Bersama(PKB)	$\frac{\text{Jumlah Perjanjian Kerja Bersama}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 100\%$	Untuk mengukur jumlah perjanjian kerja bersama.	Dinas Nakertrans
4	Jumlah Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Kerjasama Bipartit}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 100\%$	Untuk mengukur jumlah Lembaga Kerjasama Bipartit	Dinas Nakertrans
5	Angka sengketa kerja per tahun	$\frac{\text{Jumlah kasus yang tertangani}}{\text{Jumlah kasus}} \times 100\%$	Untuk mengukur besaran kasus yang tertangani di perusahaan	Dinas Nakertrans
<b>Sasaran 41:Terjaminnya hak-hak pekerja.</b>				
1	Kepesertaan Jamsostek	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang terdaftar kepesertaan jamsostek}}{\text{Jumlah pekerja}} \times 100\%$	Untuk mengukur besaran pekerja yang menjadi program jamsostek.	Dinas Nakertrans
<b>Sasaran 42 :Terciptanya penempatan Transmigran</b>				
1	Jumlah Transmigran yang ditempatkan.	$\frac{\text{Jumlah transmigran yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pendaftar}} \times 100\%$	Untuk mengukur besaran transmigran yang ditetapkan.	Dinas Nakertrans
<b>Sasaran 43 : Menyatukan pemahaman program PUG dan perlindungan anak di semua lapisan masyarakat, organisasi pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan.</b>				
2	Indeks Pembangunan Gender	$IPJ = 1/3 (( Xede (1) = Xede (2) + I inc - dis)$	Mengukur pencapaian dimensi dan variable pembangunan sumber daya manusia dengan menangkap ketidakadilan dalam hal pencapaian antara laki-laki dan perempuan.	BKK PP dan KB

3	Penurunan kekerasan terhadap anak dan perempuan	$\frac{\text{Jumlah Kasus KDDRT tahun ini} - \text{Jumlah kasus KDRT tahun lalu}}{\text{Jumlah KDRT tahun lalu}} \times 100\%$	Mengetahu Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga.	BKK PP dan KB
4	Peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang.	$\frac{\text{Prosentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah dan sosial} + \text{rasio KDRT}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	Mengetahui peran serta perempuan diukur dari partisipasi	BKK PP dan KB
<b>Sasaran 44 : Meningkatnya partisipasi kompetensi ketrampilan organisasi pemerintah masyarakat dan individu.</b>				
1	Pelatihan ketrampilan usaha ekonomi masyarakat pedesaan	$\frac{\text{Jumlah desa yang diberikan pelatihan UED}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	Mengukur keberhasilan ekonomi pembangunan.	Kantor PMD
2	Fasilitasi jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa.	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan musyawarah}}{\text{Jumlah desa dan kecamatan.}} \times 100\%$	Untuk mengukur perencanaan pembangunan.	Kantor PMD
3	Jumlah desa yang diberikan sosialisasi peningkatan kualitas LKD.	$\frac{\text{Jumlah Desa yang di beri sosialisasi dalam rangka peningkatan kualitas LKD}}{\text{Jumlah keseluruhan desa.}} \times 100\%$	Untuk mengukur terciptanya lembaga pemberdayaan masyarakat yang berkualitas.	Kantor PMD
<b>Sasaran 45 : Meningkatnya kesejahteraan PMKS/tuna sosial serta tertanganinya korban NAPZA dan penduduk usia lanjut.</b>				
1	Cakupan layanan bagi Lanjut Usia (Lansia )	$\frac{\text{Jumlah Lansia yang di tangani}}{\text{Jumlah Lansia seluruhnya}} \times 100\%$	Mengukur cakupan pelayanan Program Pemberdayaan Lansia.	Dinas Sosial.
2	Cakupan penanganan para penyandang cacat.	$\frac{\text{Jumlah Penyandang cacat yang ditangani}}{\text{Jumlah Penyandang cacat seluruhnya}} \times 100\%$	Mengukur cakupan pelayanan Program pemberdayaan Lansia.	Dinas Sosial.

3	Peningkatan penyuluhan P4GN	$\frac{\text{Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang ditangani}}{\text{Jumlah penyalahgunaan NAPZA seluruhnya}} \times 100\%$	Mengukur penanganan dalam menekan angka penyalahgunaan NAPZA	Dinas Sosial
4	Peningkatan Program BSK untuk anggota masyarakat	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan}}{\text{Jumlah anggota masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan}} \times 100\%$	Mengukur cakupan penanganan anggota masyarakat	Dinas Sosial
5	Bimbingan mental sosial bagi PMKS	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang ditanganil tahun ini}}{\text{Jumlah keseluruhan PMKS- jumlah PMKS yang ditangani tahun lalu}} \times 100\%$	Mengukur jumlah PMKS yang ditangani.	Dinas Sosial.
6	Fasilitasi pembinaan anak yatim.	$\frac{\text{Jumlah anak yang diberi santunan}}{\text{Jumlah keseluruhan anak yatim}} \times 100\%$	Mengukur peningkatan anak yatim yang diberi santunan.	Dinas Sosial.
<b>Sasaran 46 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin.</b>				
1	Tingkat kemiskinan turun	$\frac{\text{Jumlah KK miskin tahun yang dievaluasi} - \text{Jumlah KK tahun lalu}}{\text{Jumlah KK miskin tahun lalu}} \times 100\%$	Mengukur perkembangan keluarga miskin.	BKK PP dan KB
2	Menbaiknya indek gini	$\frac{\text{Indek gini tahun ini} - \text{tahun lalu}}{\text{Indek gini tahun lalu}} \times 100\%$	Untuk mengukur indek gini di Kabupaten Bantul	Bappeda
3	Data Base keluarga dan keluarga miskin	Skor hasil pendataan > 51 adalah kekeluargaan miskin	Tersediannya data sasaran pragmatis dan data system informasi program kemiskinan.	BKK PP dan KB
<b>Sasaran 47 : Meningkatnya kualitas keluarga</b>				
1	Prosentase keluarga dengan jumlah anak kurang dari 3	$\frac{\text{Jumlah jiwa}}{\text{Jumlah keluarga}} \times 100\%$	Untuk mengukur dampak program KB	BKK PP dan KB

2	Prosentase keluarga prasejahtera dibandingkan dengan jumlah total keluarga	$\frac{\text{Jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I}}{\text{Jumlah keluarga}} \times 100\%$	Mengukur keluarga pra sejahtera dan sejahtera I	BKK PP dan KB
<b>Sasaran 48 : Mantapnya penanggulangan bencana</b>				
1	Peningkatan Relokasi lokasi tanah lonsor	Jumlah unit rumah yang direlokasi pada tahun t	Jumlah unit rumah yang direlokasi pada tahun t	Bappeda
2	Penambahan dan pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan Evakuasi, rambu evakuasi.	$\frac{\text{Jumlah sarana prasarana, peralatan Evakuasi, Rambu evakuasi}}{\text{Jumlah target penambahan sarana prasarana, peralatan Evakuasi}} \times 100\%$	Untuk memperjelas dan mempertegas arahan evakuasi saat terjadi bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Penambahan Rambu rambu bahaya, pengeras suara di sepanjang pantai dan togor EWS.	$\frac{\text{Jumlah rambu bahaya, pengeras suara di sepanjang pantai dan togor EWS}}{\text{Jumlah target rambu bahaya, pengeras suara di sepanjang pantai dan togor EWS}} \times 100\%$	Untuk mengurangi Jumlah kecelakaan laut karena masih kurangnya rambu-rambu dan peringatan melalui pengeras suara.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Peningkatan Kualitas SDM	$\frac{\text{Jumlah yang dilatih}}{\text{Jumlah target yang dilatih}} \times 100\%$	Untuk meningkatkan kualitas SDM bagi pelaku penanganan penanggulangan bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>Sasaran 49 : Mantapnya pengelolaan sarana dan prasarana publik.</b>				
1	Peningkatan jalur Evakuasi	Jumlah jalur evakuasi yang terbangun di kabupaten Bantul	Mengukur kinerja organisasi dalam penyediaan akses/jalur evakuasi yang memadai	DPU

2	Jumlah sarana Evakuasi	Jumlah sarana evakuasi terbangun di kabupaten Bantul	Mengukur kinerja organisasi dalam penyediaan sarana evakuasi yang memadai.	DPU
<b>Sasaran 50 :Terwujudnya peningkatan pengelolaan SDA, perlindungan fungsi lingkungan dan keaneka ragaman hayati.</b>				
1	Tingkat kerusakan akibat penggalian dan penambangan turun	$\frac{\text{Luas kerusakan akibat penambangan yang terekklamasi}}{\text{Luas kerusakan akibat penggalian (penambangan)}} \times 100\%$	Untuk Pengendalian kerusakan lingkungan	SDA
2	Prosentase Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti.	$\frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti.}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima instansi lingkungan hidup dalam 1 tahun.}} \times 100\%$	Meningkatnya pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.	BLH
3	Informasi status kerusakan lahan	$\frac{\text{Luas lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi bio massa pada tahun berjalan.}}{\text{Luas lahan yang diperuntukan sebagai lahan dan atau tanah untuk produksi bio massa}} \times 100\%$	Untuk mengetahui meningkatnya berbagai usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan kerusakan lahan dan atau tanah.	BLH
4	Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak.	$\frac{\text{Jumlah usaha/kegiatan sumber tidak bergerak yang telah memenuhi persyaratan administrasi & teknis pengendalian pencemaran udara}}{\text{Jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang Potensial mencemari udara yang telah di investasi.}} \times 100\%$	Meningkatnya berbagai usaha dan kegiatan yang menimbulkan kerusakan lahan dan tanah.	BLH
5	Pencegahan Pencemaran Air	$\frac{\text{Jumlah usaha dan atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air}}{\text{Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi}} \times 100\%$	Meningkatnya berbagai usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran air.	BLH

6	Rasio ruang terbuka hijau per satu wilayah.	<u>Luas lahan bervegetasi</u> Luas wilayah	Mengukur ruang bervegetasi terhadap luas wilayah.	Bappeda
<b>Sasaran 51 : Terkelolanya Sumberdaya hutan.</b>				
1	Pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan	<u>Pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan (kecamatan)</u> x 100% Target daerah (kecamatan)	Mengukur kinerja dinas dalam pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan	Dinas Pertanian dan Kehutanan

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI